

## PEMERATAAN DISTRIBUSI UNTUK MENANGGULANGI KESENJANGAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Alfi Syahrin, Reza Hilmy Luayyin, Mohammad Arifin, Rahmad Hidayat  
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo  
Email : [alvinalsyahrin@gmail.com](mailto:alvinalsyahrin@gmail.com); [rezahilmyl@gmail.com](mailto:rezahilmyl@gmail.com);

### Abstrak

Salah satu kajian yang berkaitan dengan pola interaksi tingkah laku manusia ialah kajian tentang interaksi ekonomi yang mana berhubungan dengan perilaku produksi, perilaku distribusi (jasa maupun barang), juga perilaku konsumsi. Gejala tersebut merupakan gejala yang bersifat umum menjadi masalah dalam kehidupan manusia dan merupakan pokok perekonomian dari berbagai sistem yang ada. Aktivitas manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi salah satunya ialah aktivitas distribusi selain aktivitas konsumsi dan juga produksi. Secara tegas agama islam melalui kitab suci al-qur'an telah mendorong dan menuntun manusia untuk melaksanakan kegiatan distribusi, menyebarkan harta bendanya kepada mereka yang membutuhkan agar harta benda itu tidak menjadi milik sebagian kecil masyarakat dan bertumpuk pada golongan-golongan tertentu, dimana mereka yang memiliki kekayaan yang banyak akan bertambah banyak sementara mereka yang miskin akan bertambah melarat apabila pendistribusian kekayaan tidak dilakukan secara merata dan adil pada setiap masyarakat. Pemerataan pendapatan dengan cara keadilan distribusi sebagai sebuah solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi adalah solusi yang diberikan agama islam untuk umat manusia dalam menjali aktivitas dalam perekonomian.

Kata kunci : Keadilan, Distribusi, Kesenjangan, Ekonomi islam

### Abstract

*One of the studies related to the interaction pattern of human behavior is the study of economic interactions which are related to production behavior, distribution behavior (services and goods), as well as consumption behavior. These symptoms are symptoms that are general in nature and become a problem in human life and are the basis of the economy of various existing systems. Human activities in life related to economic activity, one of which is distribution activities in addition to consumption and production activities. Strictly speaking, Islam through the holy book of the Qur'an has encouraged and guided humans to carry out distribution activities, distribute their property to those in need so that the property does not belong to a small part of the community and accumulates in certain groups, where those who Those who have a lot of wealth will increase while those who are poor will become poorer if the distribution of wealth is not carried out evenly and fairly in every society. Equitable income by means of distribution justice as a solution in reducing economic inequality is a solution given by Islam to mankind in carrying out activities in the economy.*

*Keywords: Justice, Distribution, Inequality, Islamic Economics*

### PENDAHULUAN

Agama islam adalah sebuah sistem dalam kehidupan manusia yang terdiri atas aktivitas ibadah, aktivitas sosial politik, aktivitas ekonomi, serta aktivitas pemerintahan juga kenegaraan. Sebagai sebuah sistem yang mengatur segala bentuk aktivitas kehidupan manusia yang berdasar dari kitab suci al-quran juga sunnah nabi muhammad SAW. sebagai penjamin dari kegiatan yang dilakukan manusia hingga akhir kehidupannya agar bisa selamat, baik jaminan yang berkaitan dengan keselamatan agama, akal, jiwa, keturunan serta jaminan keselamatan atas kekayaan. Dari sebagian aktivitas manusia,

ekonomi menjadi salah satu bagian terbesar yang dilakukan setiap harinya. Sebab kegiatan perekonomian menjadi alat untuk keberlangsungan ketahanan hidup manusia di dunia. Dalam pandangan ekonomi Islam semua aktivitas tersebut adalah kebutuhan pokok yang mana wajib untuk dipenuhi oleh setiap insan.

Salah satu kajian yang berkaitan dengan pola interaksi tingkah laku manusia ialah kajian tentang interaksi ekonomi yang mana berhubungan dengan perilaku produksi, perilaku distribusi (jasa maupun barang), juga perilaku konsumsi. Gejala tersebut merupakan gejala yang bersifat umum menjadi masalah dalam kehidupan manusia dan merupakan pokok perekonomian dari berbagai sistem yang ada (Taufik, 2011).

Aktivitas manusia dalam kehidupannya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi salah satunya ialah aktivitas distribusi selain aktivitas konsumsi dan juga produksi. Secara tegas agama Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah mendorong dan menuntun manusia untuk melaksanakan kegiatan distribusi, menyebarkan harta bendanya kepada mereka yang membutuhkan agar harta benda itu tidak menjadi milik sebagian kecil masyarakat dan bertumpuk pada golongan-golongan tertentu, dimana mereka yang memiliki kekayaan yang banyak akan bertambah banyak sementara mereka yang miskin akan bertambah melarat apabila pendistribusian kekayaan tidak dilakukan secara merata dan adil pada setiap masyarakat (Holis, 2016).

Pendistribusian yang tidak merata, ketidakseimbangan serta ketidakadilan pada kekayaan akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi, karena ketidakadilan merupakan sumber dari masalah, baik masalah dalam masyarakat, kelompok maupun pribadi. Kita bisa lihat disekitar kita, di media sosial, media masa tentang pemberitaan mengenai kesenjangan ekonomi telah menjadi hal yang umum dan itu sangat memprihatinkan terjadi di bumi pertiwi ini (Nasution, Mustafa Edwin, 2007). Afzalur Rahman (1995) juga menambahkan yang mana hasil dari kegiatan produksi tidak seluruhnya menjadi faktor penyebab masyarakat tertimpa kemiskinan akan tetapi ada faktor yang lain juga menjadi penyebab seperti pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang tidak pada tempatnya. Masyarakat banyak menderita kemiskinan serta tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki oleh negara karena pendapatan itu tidak didistribusikan secara tepat, dan kemudian terjadi ialah kekayaan-kekayaan itu akan bersarang pada dompet kapitalis.

Negara belum dianggap sebagai negara yang berhasil bila memiliki harta kekayaan yang lebih namun tidak didistribusikan dengan prinsip kebenaran dan berprinsip pada keadilan. Hal itu juga berlaku pada masyarakat di zaman yang modern seperti sekarang ini apabila dalam masyarakat memiliki harta yang berlebih namun pada masyarakat disisi lain masih terlihat banyak penderitaan karena kemiskinan itu menjadi bukti bahwa dalam kehidupan masyarakat belum terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatannya.

Dalam kehidupan masyarakat telah wajar terjadi disparitas dalam pendapatan. Akan tetapi bila sebagian kecil masyarakat menjalani hidup dengan sangat terbatas, berada dibawah sandar kemiskinan, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat menjalani kehidupan yang mewah, hidup dengan serba kecukupan dan harta yang sangat melimpah, maka disitulah letak ketidakwajaran dalam disparitas pendapatan, Ace Partadiredja (1992). Pendistribusian pendapatan secara adil dan merata menginginkan sebuah capaian agar kesenjangan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tiada.

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk terus meningkatkan kapasitas dan skill nya secara optimal serta terus berusaha mengembangkan dan memanfaatkan kemuliaan sifat lahiriahnya sehingga ia bisa memiliki kekayaan dari hasil usahanya. Kepemilikan harta yang berbeda dari setiap manusia adalah sebuah hal diakui dalam Islam asal berada dalam koridor yang wajar. Namun apabila ada perbedaan harta yang jauh melebihi batas yang wajar dalam golongan masyarakat dan bangsa itu akan

menjadi permulaan akan terjadinya kehancuran. Pemerataan pendapatan dengan memberi batas atas kekayaan individu dilakukan sebagai maksud untuk mencegah kelompok tertentu dalam penguasaan sumber daya produktif. (Taufik, 2011)

Pemerataan pendapatan dengan cara keadilan distribusi sebagai sebuah solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi adalah solusi yang diberikan agama islam untuk umat manusia dalam menjali aktivitas dalam perekonomian. Sejalan dengan fokus teori distribusi pendapatan agar dapat mengatasi distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat jelata, terutama menjelaskan fenomena semakin melebar nya jurang pemisah antara rakyat yang miskin dan kaya. Sebab titik berat dalam pemecahan problem ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan merata di tengah masyarakat (Kalsum, 2018).

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Islam telah meletakkan pada tempat yang strategis berkaitan dengan kegiatan ekonomi supaya manusia bisa mencapai “kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin, dan tidak menderita” (Muhammad Antonio Syafi’I, 2001). harapan hidup yang lebih baik diimpikan oleh semua orang terlebih bagi mereka yang sekarang sedang menjalani hidup dibawah standar garis kemiskinan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, tulisan ini akan mengkaji tentang Keadilan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **KESENJANGAN EKONOMI DAN PERAN DISTRIBUSI OLEH NEGARA**

Ketimpangan merupakan salah satu kondisi ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Ketimpangan sosial adalah akses yang tidak setara atau tidak setara terhadap perolehan atau penggunaan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan sosial ekonomi sering terjadi di masyarakat. Masalah utama ketimpangan seringkali terletak pada ketimpangan pendapatan dan perbedaan akses terhadap pengembangan masyarakat dan penggunaan sumber daya. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, bisnis, kesempatan kerja, sarana pengembangan usaha, sarana memperjuangkan hak asasi manusia, , dan yang lainnya. Dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti halya sarana jalur politik, pengembangan karir penuh, dan lain-lain. Menurut Badruzaman (2009) kesenjangan sosial adalah kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat dan membuat perbedaan yang sangat signifikan. Atau, dapat diartikan bahwa orang kaya berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada orang miskin.

Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di seluruh dunia, yang disebabkan oleh perbedaan kualitas hidup yang sangat terasa. Fenomena ini bisa terjadi di negara manapun. Ketika datang ke kesenjangan sosial, itu sangat menonjol dalam banyak hal. Misalnya, di sisi keadilan, itu bisa terjadi. Memang benar bahwa pepatah "yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin" terpengaruh, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin dalam segala hal, termasuk penduduk pedesaan yang bermigrasi ke kota. Ketidakpedulian timbal balik ini disebabkan oleh kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin. Banyak orang kaya memandang rendah kelas bawah. Belum lagi enggan membantu, apalagi ketika mereka miskin dan jorok. (Abdain, 2014)

Kemiskinan adalah penyebab nomor satu kesenjangan sosial, sebuah tragedi dalam kehidupan masyarakat. Ketika saya melihat berita tentang kemewahan penjara pagi ini, pejabat, penjahat, dan orang-orang memiliki banyak uang. Tempat penghukuman bagi mereka yang berdosa dan tempat untuk melihat kembali kesalahan mereka, penjara

adalah tempat tinggal yang mewah seperti hotel bintang lima atau kondominium mewah. Sungguh ironis.

Orang-orang di negara ini masih berjuang untuk mengurangi kemiskinan di negara kita, tetapi buah ara di penjara hidup dalam kemewahan. Misalnya, pencuri ayam dan tali jemuran dihukum oleh masyarakat dengan dipukul secara berkelompok, disiksa oleh petugas penjara ketika mereka masuk penjara. Namun, koruptor yang mencuri miliaran rupiah uang negara bisa hidup mewah dan mendapat pelayanan yang sangat istimewa dari penjara. Bagaimana jika uang bukanlah hal yang paling penting? Bagi mereka, mereka bisa membeli apa saja bahkan hukum bisa dimbelinya. Tapi bagi orang kecil tanpa uang, mereka hanya bisa menoleransi hukuman yang mereka terima. Ketimpangan sosial seperti itu selalu menjadi tragedi dan penyakit di negara kita.

Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial dapat disebabkan oleh adanya hambatan yang menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan akses dan peluang yang ada. Secara teoritis, ada dua faktor yang dapat memiliki efek supresif. a).Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Faktor internal tersebut terdiri dari rendahnya bakat karena rendahnya tingkat pendidikan (keterampilan), kesehatan yang buruk dan adanya hambatan budaya kemiskinan. Ketimpangan sosial dapat diakibatkan oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai umum seperti ketidakpedulian cenderung mengalah pada nasib dan tidak memiliki daya juang atau orientasi hidup ke depan. Lewis menjelaskan bahwa ketimpangan sosial semacam ini muncul karena masyarakat terjebak dalam budaya kemiskinan. b).Faktor yang datang dari luar (luar) kemampuan Anda. Ini bisa terjadi karena birokrasi. Atau, ada peraturan pemerintah (pedoman) yang dapat membatasi atau meminimalkan peluang yang tersedia dan akses pribadi untuk memanfaatkan peluang. Dengan kata lain, ada hambatan atau kendala struktural daripada ketimpangan sosial karena seseorang malas atau tidak dapat bekerja karena sumber daya manusia yang terbatas atau buruk. Ketimpangan sosial ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan struktural. Alfian, Melly G. Tan, dan Selo Sumarjan menyatakan bahwa kemiskinan struktural mengacu pada kemiskinan yang diderita oleh sekelompok orang karena struktur sosial masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam penggunaan sumber pendapatan aktual yang tersedia. Ya. Kemiskinan struktural meliputi kurangnya tempat tinggal, kurangnya pendidikan, kurangnya komunikasi, kurangnya fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan kesempatan kerja, dan kurangnya perlindungan hukum, Abdain (2014).

Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa penyebab.

a. kemiskinan,

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat muncul dalam berbagai konteks sejarah: **Pertama**, sistem ekonomi moneter, upah tenaga kerja, dan sistem produksi untuk mencari keuntungan. **Kedua**, tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat setengah pengangguran dari pekerja tidak terampil terus berlanjut. **Ketiga**, rendahnya upah pekerja. **Keempat**, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politiknya, baik secara sukarela maupun atas inisiatif pemerintah. **Kelima**, sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem sepihak, dan. **Keenam**, kekuatan tatanan nilai kelas penguasa, yang menekankan akumulasi kekayaan dan likuiditas vertikal dan potensi untuk berhemat, serta status ekonomi yang rendah, adalah akibat dari ketidakmampuan individu, atau pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Budaya kemiskinan tidak hanya beradaptasi secara luas dengan seperangkat kondisi objektif dalam masyarakat, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia cenderung diturunkan dari generasi ke generasi melalui dampaknya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cenderung berkembang ketika sistem ekonomi dan sosial yang kompleks dirusak atau diganti. Budaya kemiskinan juga merupakan hasil

dari kolonialisme. Artinya dapat menghancurkan struktur ekonomi dan sosial masyarakat adat sekaligus menjaga mereka tetap rendah dan tumbuh dalam proses menghilangkan kelompok etnis. Budaya kemiskinan cenderung dimiliki tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh kelas sosial yang lebih rendah, masyarakat yang terisolasi, dan korban dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

#### **b. lapangan Kerja**

Ketenagakerjaan memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, namun ekonomi merupakan salah satu faktor berkembangnya ketimpangan sosial. Sempitnya kesempatan kerja di Indonesia sangat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia dan membuat ekonomi kelas bawah semakin rentan. Salah satu ciri angkatan kerja Indonesia adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang masih memiliki banyak lapangan pekerjaan. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia adalah kurangnya bakat untuk menciptakan lapangan kerja, kelebihan penduduk/pencari kerja, kurangnya komunikasi antara pencari kerja dengan pengusaha, dan kurangnya pendidikan bagi pengusaha. Ketimpangan sosial semakin hari semakin parah, terutama di perkotaan. Memang benar bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas melanggar rasa keadilan dan bertentangan dengan koeksistensi dan kesetaraan sosial.

### **DAMPAK YANG DITIMBULKAN KESENJANGAN SOSIAL**

Ketimpangan sosial semakin parah setiap hari. Yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Hal ini jelas melanggar rasa keadilan dan bertentangan dengan koeksistensi dan kesetaraan sosial. Apalagi ketimpangan sosial tidak sejalan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Padahal, kesenjangan sosial yang ada di sekitar kita berdampak negatif bagi masyarakat. Akibat dari meningkatnya ketimpangan sosial adalah (Abdain, 2014): a). Kewirausahaan yang lemah dan ketimpangan sosial menghancurkan minat berwirausaha, menghancurkan keinginan untuk melanjutkan usaha, bahkan menghancurkan semangat mengembangkan usaha. Pengusaha selalu diremehkan. b). Kejahatan telah terjadi dan banyak orang miskin terpaksa menghalalkan segala cara untuk memenuhi berbagai kebutuhannya karena kurangnya sumber daya keuangan dan kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk melakukan berbagai jenis tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, perjudian dan perampokan. c). Munculnya monopoli dan ketimpangan sosial berarti yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki kekuatan besar di bidang ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain berusaha untuk melebarkan sayapnya agar dapat lebih menguasai bidangnya masing-masing. Ini semakin menindas orang miskin, karena mereka tidak bisa melawannya. Misalnya, maraknya pembangunan pusat perbelanjaan di kota-kota besar dan pembangunan supermarket di kota-kota kecil secara bertahap akan menghapus penjualan pedagang di pasar tradisional.

Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran distribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, yang selanjutnya dikembangkan oleh Chapra (2001)

Hal ini sering disebut dalam kebijakan pembangunan politik sebagai “teori siklus pemerataan (equity circle)” atau “model dinamis Islam (model dynamics)”. Model dinamika merupakan rumusan dari delapan prinsip kebijaksanaan politik, “delapan prinsip bijaksana”, yang terkait dengan prinsip-prinsip lain secara interdisipliner untuk membentuk kekuatan bersama di dalam lingkaran. Rumusan ini mencerminkan sifat interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibn Haldun tentang Syaria, kekuatan politik

atau pemerintahan, masyarakat atau negara, kekayaan / sumber daya atau kekayaan. Terkait dengan semua variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk, perkembangan atau pertumbuhan dan keadilan. Variabel-variabel tersebut berada dalam siklus interdependen karena saling mempengaruhi. Chapra (2001). Analisis bn Khaldun dapat ditentukan dalam bentuk hubungan fungsional dengan persamaan yang diberikan Chapra (2001) sebagai berikut:

Di sisi lain, rumusan Umer Chapra dengan menggunakan model dinamika sosial ekonomi syariah dikembangkan sebagai berikut :

Negara memainkan peran penting dalam teori siklus keadilan Ibn Khaldun, tetapi ini tidak berarti bahwa negara menuntut karakter monolitik dari pemerintah. Negara tidak boleh menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang, tetapi mereka harus menggunakan kekuasaan itu untuk menciptakan lingkungan yang tepat agar pasar dapat berfungsi dengan baik dan untuk mencapai pembangunan dan keadilan. Negara adalah lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan, pengeluaran yang moderat, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari perpajakan yang membosankan. Menurut Chapra, gagasan negara Ibn Khaldun bukanlah negara *laissez-faire* atau negara totaliter, tetapi promotor pembangunan dan kesejahteraan manusia. (Masyhuri, 2005)

Upaya memajukan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak bisa hanya didasarkan pada mekanisme pasar. Ini karena mekanisme pasar berdasarkan sistem harga berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tidak dapat secara memadai menyelesaikan penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Pada kenyataannya, pasar tidak dapat berfungsi secara optimal karena adanya pelanggaran kondisi persaingan seperti asimetri informasi, hambatan perdagangan, monopoli dan distribusi yang tidak teratur. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan bersama, kita perlu memainkan peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan aktif dalam sistem distribusi ekonomi mekanisme pasar syariah, yang tidak hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah juga berperan besar dan penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai “wasit” bagi permainan pasar (*almuhtasib*), tetapi juga berperan aktif dengan pelaku pasar lainnya. Pemerintah bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen dan konsumen kegiatan pasar. (Holis, 2016)

Peran negara juga penting, terutama jika pasar tidak mampu menghasilkan distribusi yang adil dan ada hambatan untuk membangun mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki kekuatan untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Pengusaha, masalah hamster merajalela karena monopoli dan oligopoli perusahaan besar atas produk tertentu, asimetri informasi, gangguan saluran distribusi dengan menghalangi masuknya produk ke pasar, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Bagaimana cara melakukannya. Selain mengintervensi untuk memastikan terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar yang adil, juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi dengan integritas, keterbukaan dan keadilan, serta menciptakan persaingan yang baik. Tidak ada suap-- menyuap dan mekanisme kepentingan khusus pemerintah. (Abdul & Noor, 2012)

Negara memiliki tugas untuk memenuhi kewajiban setiap individu dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, misi bangsa adalah mewujudkan teori menjadi kenyataan, norma menjadi hukum, dan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari. Selain itu, negara juga berperan sebagai penjamin bagi terciptanya pemerataan dan sebagai promotor pembangunan manusia serta terciptanya kepentingan umum. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan tidak ada sistem yang bisa menekan pengusaha. (Abdul & Noor, 2012)

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi kegiatan ekonomi produktif berupa berbagai kegiatan pengembangan properti di bawah Konvensi Muamara. Misalnya, melalui investasi, kami membuka peluang seluas-luasnya untuk penyebab berkelanjutan dari properti individu dan pengembangan properti, melarang penyimpanan properti, dan mengatasi distribusi dan konsentrasi kekayaan. Larangan kegiatan monopoli, berbagai penipuan, perjudian, riba, korupsi dan suap di beberapa kelompok. (Rahmawaty, 2010)

Pemerintah memainkan peran dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian. Artinya, pertama-tama, peran yang terkait dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran terkait dengan fungsi teknis mekanisme pasar. Dan ketiga, peran yang terkait dengan kegagalan pasar. Karena kedudukan pemerintah tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga fungsi keagamaan dan sosial, ketiga peran tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.

## **DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM**

Bagian-bagian dalam ekonomi islam dibentuk dengan dasar agama islam, oleh sebabnya seluruh bagian yang ada meliputi bagian dalam agama islam. Didalam ekonomi islam dipelajari bagaimana manusia secara individu berperilaku dengan tuntunan agama islam, baik tentang bagaimana individu tersebut menentukan tujuan hidup, memecahkan dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, serta pegangan atau prinsip dalam proses menggapai apa yang dituju. Sebuah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia untuk menempatkan dan mengolah apa yang ada di muka bumi untuk mencapai sebuah kemenangan dalam kehidupan yang didasarkan pada sebuah prinsip keislaman dan nilai-nilai qur'an dan sunnah disebut dengan ilmu ekonomi islam. Maka bisa kita pahami bahwa ekonomi islam memiliki tali penghubung dengan agama islam yang sangat erat, dan menjadi pembeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun yang lainnya.

Ada sebuah perbedaan antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional dimana ekonomi konvensional menitik beratkan pada menganalisis permasalahan dalam ekonomi yang kemudian mencari solusinya, sementara ekonomi islam tidak hanya menitik beratkan pada penyelesaian masalah akan tetapi juga bagaimana memandang sebuah masalah ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, al- Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as- Sunnah, sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.

Memahami kehidupan dengan memandang bahwa harta atau materi merupakan segalanya adalah sebuah pemahaman yang salah, karena dalam kehidupan manusia tidak hanya pada aspek materi akan tetapi juga ada aspek lainnya ialah aspek spiritual yang juga tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kedua aspek itu berada dalam ekonomi islam, hal itu tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility) (Naqvi, 2003). Kesatuan/tauhid merupakan penekanan pertama dalam agama islam yang hubungannya secara vertikal dimana segala bentuk pertolongan itu bersumber dari satu yaitu Tuhan yang Maha Esa yang menjadi petunjuk ke arah yang benar. Derajat manusia sama disisi tuhan dan tidak

ada perbedaan, makhluk yang merdeka tidak ada yang memiliki hak untuk menjadikan budak antar sesamanya, yang kemudian bisa menjadi penggerak integrasi social. Hal ini telah menjadi keyakinan umat islam kemudian secara sukarela manusia saling tolong menolong antar sesama dan saling memberi kebermanfaatan dalam menjalani kehidupan.

Aksioma yang kedua adalah keseimbangan, hubungan antar manusia yang mengharuskan tercapai sebuah keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan, Kesamaan serta keseimbangan yang telah tersaring dalam sebagian besar etika islam, meliputi diantaranya pemerataan kekayaan.

Ketiga, kebebasan (free will) adalah kebebasan yang dibingkai oleh tauhid, artinya manusia tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan buruk bersumber dari kedudukan manusia sebagai wakil (khilafah) Allah di muka bumi dan dari kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. melakukan. Namun, untuk berorientasi dan berguna bagi tujuan sosial dalam kebebasan yang diberikan Tuhan, ditanamkan melalui aksioma keempat, yaitu tanggung jawab sebagai komitmen usaha yang mutlak. meningkatkan kebahagiaan manusia. Adapun teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis), hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha kepada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap individu dalam masyarakat bebas memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya. mampu membayar dan tergantung pada faktor produksi yang mereka putuskan, distribusinya adil atau tidak. dan dipersepsikan secara setara oleh semua individu dalam masyarakat atau hanya oleh segelintir orang. Teori yang dianut oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) adalah dzalim dari sudut pandang ekonomi Islam karena teori tersebut masuk akal untuk akumulasi kekayaan hanya untuk sejumlah kecil pihak.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang justru melindungi kepentingan semua warga negara, baik kaya maupun miskin, dengan mempercayakan yang kaya tanggung jawab moral mengurus yang miskin. Sistem ekonomi Islam mensyaratkan bahwa dalam hal distribusi harus didasarkan pada dua artikulasi, yaitu kebebasan dan pemerataan. (Holis, 2016) Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai keimanan dan keadilan, bertentangan dengan pemahaman kapitalis, yang menegaskan bahwa itu adalah tindakan yang membebaskan orang untuk bertindak. dan bertindak tanpa campur tangan dari pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan faktor fisik dan mentalnya. (Syukur, 2018), keseimbangan antara individu dan masyarakat dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sementara keadilan distributif ini tercermin dalam larangan dalam Al-Qur'an (al-Hasyr: 7) untuk membiarkan kekayaan mengalir hanya untuk orang kaya, tetapi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (perfect equilibrium). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmalinai dkk, 12 yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-913 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60): 8, 14 al-Maidah (5): 42, 15 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain.<sup>16</sup> Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam,



diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang berdasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan distributif tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar berdasarkan sistem harga berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tidak dapat secara tepat menangani penawaran barang publik, eksternalitas, pemerataan, dan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam praktiknya, pasar juga tidak dapat berfungsi secara optimal karena kondisi pasar yang kompetitif tidak terpenuhi, seperti asimetri informasi, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan permasalahan yang lainnya. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan (al-Qardhawi, 1997: 201). Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini, Amalia (2008).

## **DISTRIBUSI DALAM ISLAM SEBAGAI SOLUSI MENANGGULAGI KESENJANGAN EKONOMI**

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkembang dari sistem sosial Islam dan diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan yang mengedepankan kemanfaatan dan keadilan perekonomian nasional. Kebijakan distribusi sistem ekonomi Islam mendukung nilai keadilan berdasarkan konsep distribusi Al-Qur'an Surah al-Hashul, "agar kekayaan tidak menumpuk hanya dalam satu kelompok". Menurut Sihab, bagian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa harta tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang saja. Karena Islam menetapkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial sejak awal, maka harta harus diedarkan dalam masyarakat agar dapat digunakan oleh seluruh anggota masyarakat, mengakui hak milik dan melarang monopoli. (Abdul & Noor, 2012)

Sistem ekonomi Islam memberikan sistem distribusi ekonomi yang menekankan nilai bertindak dan kebebasan bertindak berdasarkan ajaran agama dan nilai keadilan yang dimiliki berdasarkan dua titik: kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menyediakan mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan non-ekonomi, dengan memasukkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi produktif dan tidak produktif untuk mencapai keadilan distributif.

Dalam Islam, distribusi tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat mendesak dalam mencapai pemerataan ekonomi di masyarakat. Agar proses distribusi memiliki kepentingan yang cukup maka menurut Idri (2016) beberapa prinsip harus diperhatikan, antara lain: Pertama, Prinsip Keadilan, merupakan nilai Islam yang paling fundamental, termasuk aspek ekonomi. Strategi untuk mencapai pemerataan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Keadilan distributif adalah komitmen untuk mencapai batas minimum pendapatan riil untuk semua. Mungkin ada perbedaan pendapatan atau konflik ketika batas minimum tercapai. Oleh karena itu, Islam tidak terobsesi dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan di semua lapisan masyarakat.

Kedua, Prinsip Persaudaraan, di dalam Islam prinsip persaudaraan yang tidak diskriminatif dan eksklusif, tetapi inklusif dan universal. Bukan hanya ukhuwah islamiyah, bahkan ukhuwwah manusia. Oleh karena itu, Islam mengizinkan pemeluknya untuk bertransaksi dengan siapa saja, tanpa membedakan ras atau agama. Islam menganjurkan persaudaraan dan cinta dalam distribusi sehingga setiap orang dapat memperkuat diri secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Distribusi kekayaan dalam Islam mempromosikan persaudaraan dan cinta, hal ini dibuktikan dengan konsep zakat, sedekah, subsidi, dan lain-lain, sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Ketiga, prinsip solidaritas sosial. Prinsip solidaritas sosial terdiri dari beberapa elemen dasar, antara lain; (a). Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk hidup, (b). Perlu bersimpati dan bersimpati dengan orang miskin, (c). Kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara sekelompok orang, (d). Ada keharusan untuk berbuat baik kepada orang lain, (e). Seseorang tanpa kekayaan abadi harus menyumbangkan energinya untuk tujuan sosial, (f). Dilarang berbuat baik demi citra (riya). Beberapa hal membuktikan bahwa Islam memiliki banyak ajaran yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan di antara orang-orang. Memang, dalam ekonomi Islam, pertumbuhan bukanlah nilai tetapi distribusi, Hal ini sejalan dengan pernyataan Thomas Robert Malthus (1766-1834) yang dikutip Athoillah “ tidak setiap pertumbuhan akan menambah kemakmuran bersama, bisa jadi justru sebaliknya” (Athoillah, 2017:115)

## **KESIMPULAN**

Sistem ekonomi Islam mampu memberikan nilai dan perilaku serta akhlak dan kebutuhan manusia sebagai entitas sosial tanpa melihat adanya perbedaan klasifikasi kehidupan. hidup. dari manusia. Peran ekonomi Islam dalam mengatasi tingkat kesenjangan sosial adalah bahwa semua manusia yang hidup dalam masyarakat harus bekerja (berusaha) untuk memenuhi kebutuhannya dan memanfaatkan potensi yang mereka punya. Sistem ekonomi Islam yang menyediakan sistem distribusi ekonomi yang menonjolkan nilai kebebasan bertindak dan bertindak berdasarkan ajaran agama dan nilai keadilan dalam harta benda berdasarkan dua artikulasi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distributif ini memperkenalkan suatu mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan mengaitkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. produktif dan non produktif, guna mencapai pemerataan distributif. Pemerataan distribusi akan memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat yang diharapkan berdampak terhadap berkurangnya kesenjangan ekonomi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, IV(2), 15–26.
- Abdul, R., & Noor, G. (2012). Kebijakan distribusi ekonomi islam dalam membangun keadilan ekonomi indonesia, 6(2).
- Ace Partadiredja. (1992). *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- Badruzaman, A. (2009). *Dari Teologi Menuju Aksi Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (terjemahan Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press.
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah*, 1(2), 1–14. Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/759/554>
- Idri. (2016). *Hadits Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenada Media.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam, 3, 41–59.
- Masyhuri. (2005). *Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, dalam *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muhammad Antonio Syafi’I. (2001). *Bank Syariah. Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mustafa Edwin, D. (2007). *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid 1). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmawaty, A. (2010). MEMBANGUN SISTEM DISTRIBUSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
Oleh: Addin, 2(2).
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51.  
<https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>

**Muhammad Alfi Syahrin, etc., *Pemerataan Distribusi untuk Menanggulangi Kesenjangan  
Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam***

Taufik, R. (2011). *KONSEP PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. riau.